BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Informasi menjadi unsur pokok yang melekat di masyarakat guna memenuhi kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan dalam menunjang aktivitas. Dalam mendukung aksesibilitas penyebaran informasi yang merata dibutuhkan teknologi. Teknologi dinilai memiliki tingkat kecepatan yang pesat, lantaran dibekali oleh jaringan internet yang mampu mempublikasikan informasi dalam hitungan detik tanpa proses panjang. Tak heran, jika saat ini banyak sekelompok orang mulai mengonsumsi informasi melalui media daring. Selain cepat dan ringkas, informasi yang terpublikasi secara daring memberikan efektivitas dan akomodasi yang mudah bagi setiap orang untuk mengetahui hal-hal disekitarnya. Ketersediaan informasi dalam media daring saat ini menjadi opsi setiap orang untuk berkembang, baik secara pengetahuan maupun secara praktikal.

Menurut definisinya, media daring seringkali diartikan sebagai media baru yang sebelumnya adalah hasil dari konvergensi media cetak dan media elektronik. Media daring merangkap pada portal/website, aplikasi fungsional untuk bertukar pesan secara online dan media sosial yang telah menjadi tempat berinteraksi, bertukar pesan, dan mencari informasi paling populer saat ini. Eksistensi dari kemunculan media sosial menjadi forum digital terbesar bagi seseorang untuk mempublikasikan informasi, menyebarkan informasi dan berkomunikasi secara anonim tanpa adanya batasan (Fitriani Yuni, 2017).

Digunakan sikap fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan di era digital, khususnya bagi jajaran humas yang menjadi ikon penting digitalisasi sebagai mediator jalannya komunikasi atau media penghubung pesan. Fenomena ini menjadi tantangan bagi jajaran humas untuk mengelola sekaligus mempublikasikan informasi agar dapat menimbulkan opini publik yang positif dan meningkatkan kepuasan publik akan kinerja instansi yang dinaungi. Tuntutan informasi dan aksesibilitas menjadi faktor penting, lantaran mendukung dari segi mobilitas dan dinamika organisasi yang berhubungan erat dengan jalannya operasi organisasi (Luh, Permini, Made, & Atmaja, 2022).

Penting bagi Humas dalam proses perancangan kebijakan dan langkah yang diambil untuk kegiatan program kerja berikutnya guna mencapai tujuannya yakni melindungi dan mengelola citra atau image baik yang digunakan sebagai peningkatan kepercayaan atau

kredibilitas dalam mendukung identitas perusahaan atau instansi terkait. Landasan bagi Humas dalam mencapai efektivitas yakni menerapkan kebijaksanaan dan melaksanakan kegiatan yang produktif bagi kepentingan publik (Muhibuddin, 2023) Hal ini sejalan dengan Humas menurut Cutlip yang berfungsi sebagai manajemen untuk mengidentifikasi kebijakan, tata cara seseorang atau organisasi untuk merancang program kegiatan dalam memperoleh dukungan publik (Caroline Dinda & Sihidi Taqwa, 2022).

Humas Polri merupakan divisi yang berada dibawah naungan Kepolisian menjadi bidang yang penting bagi instansi kepolisian guna membangun, menjaga maupun memperbaiki citra Polri. Citra positif diperlukan bagi instansi Polri dalam membentuk kepercayaan dan sudut pandang bagi masyarakat terhadap Polri. Dengan adanya kepercayaan, sudut pandang yang baik dan interaksi yang baik maka Polri dianggap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pelindung masyarakat. Untuk itu, sebagai seorang Humas Kepolisian diperlukan sifat membina guna mengembangkan partisipasi masyarakat (Arif F. Muhammad & Widiawan F. Rizky, 2022). Pembinaan masyarakat untuk menjalankan fungsi kehumasan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan media sosial. Penggunaan media sosial menjadi opsi bagi Humas Kepolisian untuk menjangkau publik secara lebih luas.

Sidoarjo yang dikenal sebagai kota delta dan penghasil udang serta bandeng ini terdapat Kepolisian Tingkat Resor Kota atau yang dikenal sebagai Polresta Sidoarjo. Polresta Sidoarjo merupakan kepolisian di tingkat kota yang berada dibawah naungan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) di tingkat Provinsi. Dalam menjalankan fungsi Kepolisian, Polresta Sidoarjo berperan untuk menyelenggarakan keamanan, ketertiban, informasi serta perlindungan kepada masyarakat Sidoarjo. Maka dari itu, penting bagi Polresta Sidoarjo untuk membangun hubungan dan menjalin interaksi yang baik dengan masyarakat setempat demi keberlangsungan pembentukan citra Polri di wilayah Sidoarjo.

Bidang Kehumasan yang terdapat di Polresta Sidoarjo berfungsi untuk membangun citra Kepolisian di wilayah Sidoarjo. Penyampaian informasi perlu mencakup semua elemen masyarakat untuk memberikan keterangan kepada masyarakat terkait kejelasan mengenai kebijakan dan peraturan yang diberikan oleh Polresta Sidoarjo. Dalam hal ini, Polresta Sidoarjo menggunakan media sosial Instagram sebagai media penyampaian informasi. Konten yang dipublikasikan mencakup aktivitas anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo bersosialisasi dengan masyarakat, informasi seputar peraturan Kepolisian dalam mewujudkan ketentraman di lingkup masyarakat dan beberapa postingan yang menunjukkan kepedulian Polri terhadap

masyarakat serta hubungan baik Polri dengan organisasi maupun instansi Pemerintahan lainnya.

Kerja Praktik yang dilaksanakan oleh penulis selama dua bulan dilakukan setiap harinya, terkecuali hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional di Polresta Sidoarjo. Melalui pelaksanaan kerja praktik ini, penulis mendapat pembelajaran untuk mengetahui secara lebih detail terkait kinerja Humas Polri dalam lingkup Polres. Terlebih, Humas Polresta Sidoarjo yang berfokus pada proses produksi konten di Instagram sehingga penulis diharapkan untuk mampu memikirkan konsep konten yang dapat membangun citra Polri. Hasil kinerja yang didapat oleh penulis adalah berupa dorongan psikologis yang mampu membuat penulis untuk optimis dalam bekerja, terbuka terhadap saran atau masukan dikarenakan Humas Polresta Sidoarjo kerap berdiskusi terkait pembuatan konten, melatih interaksi dengan anggota Kepolisian dan masyarakat, tanggap terhadap suatu permasalahan dan profesional dalam membangun hubungan kerja secara berkelompok.

I.2 Bidang Kerja Praktik

Pada pelaksanaan kerja praktik, penulis mengambil posisi sebagai Humas di Institusi Polri yakni Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo.

I.3 Tujuan Kerja Praktik

Terdapat 2 (dua) tujuan dalam penulisan proposal kerja praktik ini yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut :

I.3.1 Tujuan Umum

- a. Pemenuhan kebutuhan akademik mata kuliah Kerja Praktik sebagai salah satu persyaratan khusus kelulusan dalam menempuh studi pendidikan tingkat sarjana jurusan Ilmu Komunikasi.
- b. Membantu dalam pengembangan praktikal mahasiswa dari teori dasar yang sebelumnya diajarkan, dengan harapan bahwa mahasiswa dapat memperluas pengalaman.

I.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari Kerja Praktik adalah:

- a. Memberikan pengetahuan serta meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengimplementasikan kinerja Humas kepada mahasiswa dengan harapan mampu

memberi bekal kepada mahasiswa dalam menunjang profesi Humas mahasiswa kedepannya.

- b. Memberi gambaran kepada mahasiswa mengenai runtutan kegiatan yang dilakukan oleh Humas. Mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan sehingga mahasiswa dapat terjun langsung kedalam profesi Humas dan mewujudkan secara nyata ilmu pengetahuan yang didapat bagi keberlangsungan jenjang karir dan manajemen proyek humas dalam lapangan pekerjaan.

I.4 Manfaat Kerja Praktik

I.4.1 Bagi Penulis

Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu yang terdapat dalam perkuliahan guna menunjang permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh mahasiswa sehingga mahasiswa dapat terlatih untuk berpikir kritis dan tepat dalam menanggapi permasalahan sekaligus menciptakan solusi yang sesuai dengan tingkat permasalahan.

I.4.2 Bagi Humas Polresta Sidoarjo

Menciptakan hubungan baik melalui perolehan kesepakatan kerjasama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hubungan kerjasama ini tampak melalui sharing, diskusi bersama selama masa pelaksanaan kerja praktik untuk meningkatkan *skill* dan *passion* serta pengetahuan mahasiswa terkait bidang kehumasan dalam instansi Polri.

I.5 Tinjauan Pustaka

I.5.1 Hubungan Masyarakat

Menurut Liliweri hubungan masyarakat atau biasa disingkat “Humas” pada definisinya secara teoritis berhubungan dengan ilmu komunikasi yang bersifat praktis dan memiliki keterkaitan secara langsung dengan praktik empiris (Rizki Mulia, Harahap, & Anas Azhar, 2022, p.39). Jefkins mendefinisikan Humas sebagai bentuk komunikasi yang dirancang secara internal maupun eksternal, mencakup pihak organisasi dengan khalayak guna mencapai tujuan spesifik. Pernyataan ini didukung oleh Dr. Rex Harlow yang menjelaskan Humas memiliki fungsi manajemen khusus yang mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur kerjasama melibatkan organisasi dengan publik yang mencakup aktivitas komunikasi, pemahaman makna, penerimaan dan kerjasama guna membantu operasional manajemen dalam menanggapi beragam opini publik, mendukung manajemen operasional, mengantisipasi kecenderungan dengan penggunaan teknik komunikasi sebagai sarana utama (Hulasoh Ela, 2018, p.33).

Menurut Rachmadi, Humas bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan, pengertian, *goodwill* dan citra yang baik dengan publik masyarakat. Maka dari itu, Humas diharuskan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui proses komunikasi timbal balik yang saling memberi respon positif (Hastardjo Sri & Yuliandari N Dewi, 2019, p.3). Djanalis Djanaid dalam (Hulasoh Ela, 2018, p.33) membagi fungsi Humas menjadi dua yakni fungsi konstruktif dimana Humas mempersiapkan mental publik guna menerima kebijakan dari organisasi atau lembaga sehingga dapat memahami kepentingan publik, memberikan evaluasi terhadap perilaku publik maupun organisasi untuk diserahkan kepada manajemen. Fungsi korektif yakni Humas berperan untuk mengatasi terselesaikannya masalah saat terjadi krisis yang melibatkan organisasi dengan publik. Dozier dan Broom membagi peranan Humas menjadi empat kategori yakni (Anggrahini D., Rochayanti, & Sosiawan A., 2008) :

1. *Expert Prescriber* yakni membantu dalam proses manajemen pencarian solusi untuk menyelesaikan masalah hubungan dengan publiknya.
2. *Communication Fasilitator*, Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator dalam memberikan bantuan kepada pihak manajemen terkait kebutuhan publik dan organisasi.
3. *Problem Solver Process Fasilitator*, Humas menjadi bagian dari tim manajemen dalam membantu pimpinan organisasi mulai dari sebagai penasihat sampai pada proses pengambilan keputusan apabila terjadi persoalan.
4. *Communication Technician*, dimana Humas selaku *journalist in resident* hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau *method of communication in organization*

Humas digunakan oleh setiap organisasi, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk memelihara hubungan organisasi dengan publik melalui rangkaian aktivitas komunikasi. Walaupun secara definisi sama, Humas Pemerintah berbeda dengan Humas non Pemerintah. Perbedaan ini tampak dari ruang lingkup dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kehumasan. Pada lembaga pemerintahan, humas bertanggung sebagai jembatan yang menghubungkan antar lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah dengan media serta lembaga pemerintah dengan masyarakat. Tanggung jawab ini diwujudkan nyatakan oleh Humas melalui tugas Humas dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi terkait dengan kebijakan, program, aktivitas serta pencapaian yang diraih untuk menarik respon masyarakat terhadap lembaga pemerintahan tersebut (Cahyani M Adelia, 2020,p.3).

Humas dalam pemerintahan memiliki dasar pemikiran yang berdasarkan pada 2 fakta dasar yakni yang pertama hak masyarakat dalam mengetahui suatu hal terkait kondisi pemerintahan sehingga para pejabat pemerintah bertanggung jawab dalam memberi keterangan kepada masyarakat. Dan kedua, masyarakat berperan dalam pemberian masukan terkait persoalan maupun tekanan sosial kepada pejabat pemerintahan untuk mengetahui kondisi masyarakat serta memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Dasar pemikiran tersebut sejalan dengan tugas Humas pemerintah dalam fungsi edukatif, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan citra dan reputasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjalin hubungan yang baik (Maulidia Rafiq, 2020, p.6).

Susanto menjabarkan tugas kehumasan pemerintahan yang terbagi menjadi 2 yakni (Anggrahini D. et al., 2008, p.5) :

1. Tugas taktis dalam istilah Humas berarti menjalankan tugas berdasarkan pengamanaan kebijakan pemerintah dimana Humas juga berperan sebagai juru bicara dan koordinator lalu lintas informasi dengan masyarakat.
2. Tugas strategis Humas yakni keterlibatan Humas dalam proses pembuatan keputusan pemerintah.

Humas pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagai kehumasan pemerintah seperti yang telah dijabarkan oleh Mordecai dalam mencapai tujuannya yakni :

1. Memberikan motivasi secara internal dalam instansi itu sendiri.
2. Menyebarluaskan informasi terkait aktivitas internal dari instansi itu sendiri kepada publik.
3. Mengimplementasikan kebijakan publik.
4. Menjalini hubungan dengan media untuk mempublikasikan terkait kebijakan pemerintah.
5. Meningkatkan sensitivitas instansi terhadap publik.

Kepolisian Republik Indonesia atau yang disingkat Polri sebagai penunjang negara bertugas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum di tengah masyarakat. Untuk itu, Polri diwajibkan dapat memadani sikap ideal dan professional guna menciptakan keharmonisan masyarakat. Selaku institusi, Polri perlu terus membangun dan mengembangkan sinergitas kemitraan dengan berbagai pihak sehingga dalam melaksanakan tugasnya, Polri

perlu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mencegah adanya krisis hubungan antara Polri dengan masyarakat.

Fenomena tersebut diakibatkan dari adanya pemberitaan negatif terkait dengan instansi Polri, baik melalui media sosial maupun dari mulut ke mulut. Ditambah lagi, diakibatkan dari adanya tindakan dari oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat citra Kepolisian semakin buruk dan mengakibatkan adanya krisis kepercayaan. Hal tersebut menjadi point penting bagi keberlangsungan Polri dalam mencapai keberhasilan sebagai sebuah instansi, lantaran citra positif (*good image*) merupakan tolak ukur dalam tercapainya sebuah tujuan dari organisasi. (Pratiwi Ni et. al 2021, p.3). Untuk itu, dibutuhkan divisi Humas dalam menangkal adanya permasalahan yang terjadi pada instansi Polri.

Fungsi Satker Divisi Humas Polri menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memberikan bantuan terhadap proses integrasi opini masyarakat guna mendukung tugas-tugas kepolisian yang salah satunya adalah program sosialisasi informasi. Melalui media sosial, suatu unit kerja Humas Polri berfungsi dalam merencanakan kegiatan berkomunikasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsi kehumasannya, Divisi Humas Polri memiliki beberapa unit kerja atau biro diantaranya, Biro Penerangan Masyarakat (Biro Penmas) yang bertugas dalam penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan media massa melalui pemberian informasi terkait dengan Polri dalam menerapkan kamtibmas di tengah masyarakat (Kardi Wiyati, Sukarni, & Avisena, 2024)

Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Biro PID) pada satuan kerja ini, Humas Polri memberikan tuntunan dan himpunan serta pengelolaan informasi yang mendukung penyampaian kualitas informasi kepada publik. Biro Multimedia (Biro Mulmed) yang bertugas dalam melakukan pengelolaan media informasi berbasis internet, baik media sosial ataupun media daring.

Humas Polresta Sidoarjo dalam menjalankan fungsi kehumasan kerap dihadapkan pada krisis dan fenomena yang dapat mempengaruhi citra Polri. Beragam upaya dilakukan oleh Humas Polresta Sidoarjo untuk mengintegrasikan dan menjaga kesinambungan hubungan antara Polri dengan masyarakat. Untuk itu, Humas Polresta Sidoarjo diharapkan untuk melakukan pemantauan pada media daring dan media sosial guna mengantisipasi adanya pemberitaan yang merusak citra Polri, menjaga hubungan internal dan eksternal baik dengan

anggota internal yang meliputi Polri dan staf Kepolisian maupun dengan pihak-pihak media, serta menjalin keharmonisan dengan masyarakat. Upaya tersebut dapat dikembangkan oleh Humas Polresta Sidoarjo melalui beberapa rangkaian kegiatan yang dirancang sehingga diharapkan pada setiap proses komunikasi yang disampaikan mampu memberikan dampak dan manfaat yang tidak hanya untuk Polri melainkan dalam perwujudan khamtibmas di tengah masyarakat.

I.5.2 Media Sosial Instagram

Andika merepresentasikan media sosial adalah platform berbasis online yang memfasilitasi pengguna untuk mempresentasikan dirinya melalui fitur canggih seperti berbagi foto atau video, tempat untuk berinteraksi antar sesama pengguna, dan menggunakan internet yang menghubungkan koneksi sosial (Astari, 2021) Selaras dengan pendapat Andika, Van Dijk memberikan representasi media sosial secara singkat yakni media sosial merupakan platform yang dirancang untuk memenuhi eksistensi pengguna dalam beraktivitas (Widaswara et al., 2023). Media sosial sebagai produk perkembangan terbaru dari internet memberi kemudahan bagi setiap individu dalam berinteraksi sosial secara online tanpa membutuhkan banyak pertimbangan, waktu yang berlebih dan akomodasi yang menyulitkan.

Instagram merupakan bagian dari platform media sosial yang menyediakan berbagai fitur canggih bagi para penggunanya untuk mengekspresikan diri di dunia digital. Selain itu, Instagram juga dapat digunakan dalam berinteraksi tanpa adanya batasan jarak dan waktu, membagikan foto dan video, menggunakan filter digital dan mempublikasikan informasi dengan jangkauan yang tak terbatas. Atmoko (Amelia Luky & Amin Saiful, 2022) memberikan uraian terkait kegiatan di Instagram yang berguna untuk mendukung interaksi yakni :

1. *Comment*, fitur ini digunakan saat pengguna memberikan opini pada laman postingan di halaman yang dipublikasikan oleh pengguna lain. Aktivitas ini biasa dapat merujuk pada beberapa tanggapan sesuai dengan sudut pandang pengguna lain.
2. *Follow*, merupakan bagian dari aktivitas pengguna untuk menjalin pertemanan dengan pengguna lain sehingga dapat mengetahui beragam aktivitas pengguna yang diikutinya untuk memperoleh informasi terkait dengan kehidupan pengguna lain yang ditampilkan.
3. *Snapgram/Instastory*, sama halnya dengan snapchat, snapgram atau instastory ini merupakan fitur yang difasilitasi oleh Instagram bagi penggunanya untuk mengunggah foto atau video apapun dalam kurun waktu 24 jam.

4. *Livestreaming*, fitur ini kerap digunakan oleh pengguna Instagram untuk berinteraksi langsung dengan pengguna lain di waktu yang sama.
5. *Reels*, fitur ini memiliki kesamaan dengan TikTok yang terdiri dari beragam video pendek berdurasi singkat. Selain itu, fitur ini kerap digunakan oleh pengguna untuk merekam sekaligus menyuntingnya.

Humas Polresta Sidoarjo menggunakan sosial media Instagram sebagai opsi utama untuk menyampaikan informasi secara daring kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menampilkan iklan layanan masyarakat guna memperluas jangkauan yang dapat terjangkau oleh khalayak luas. Pembaruan informasi dari Polri harus dilakukan dan disebarluaskan di masyarakat luas sehingga masyarakat memperoleh informasi terbaru seputar aktivitas Polri, informasi iklan masyarakat guna memberikan edukasi, peringatan, himbauan, interaksi dengan masyarakat dan informasi terbaru seputar Polri dengan memanfaatkan berbagai fitur di Instagram. Fitur tersebut perlu dimanfaatkan oleh Humas Polresta Sidoarjo dalam mengemban tugas dan fungsi kehumasan khususnya di wilayah Sidoarjo sehingga masyarakat memperoleh informasi secara lebih meluas dan tervalidasi. Selain itu, Instagram juga digunakan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak media untuk membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat dan menjalin relasi yang berintegritas guna mewujudkan masyarakat yang bersinergi serta validitas informasi yang akurat.

I.5.3 Proses Produksi Konten

Publikasi konten terbagi menjadi tiga tahap proses sebagai berikut :

1. Pra produksi

Tahap ini terjadi perencanaan pembuatan konten dimulai dari penyusunan konsep, tujuan pembuatan konten, penggambaran konten yang hendak ditampilkan seperti apa, media yang digunakan untuk mempublikasikan konten, properti, latar syuting dan beberapa hal yang dibutuhkan saat hendak memproduksi konten. Di tahap pra produksi. (Ardiyansyah Poernomo & Hari Wibowo, 2023, p.3) terdapat tiga tahapan yakni ide, pengembangan skenario, dan pengembangan karakter.

Tahapan perancangan ide, dibutuhkan pertimbangan salah satunya yakni target audiens yang hendak dijangkau. Pemilihan ide yang tepat sesuai sasaran dapat membangun cerita menjadi baik dan memberikan pemaknaan yang mudah dicerna oleh target audiens. Sebaliknya, apabila ide tidak dirancang dan dipertimbangkan dengan baik, maka akan terdapat kesalahan yang berakibat lambatnya pemahaman yang akan

digunakan. Pada proses perancangan ide, Humas Polresta Sidoarjo diharuskan untuk menyesuaikan dengan tema yang ditentukan. Penentuan tema ditentukan berdasarkan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat dan waktu-waktu penting yang tercatat dalam kalender atau hari besar Polri. Berdasarkan hal tersebut, Humas Polresta Sidoarjo kerap melakukan riset khususnya jika menyangkut fenomena masyarakat.

Riset biasa dilakukan dengan cara mengamati media sosial, berinteraksi dengan penduduk sekitar, laporan yang didapat dari arsip Kepolisian, informasi dari media partner, survey di internet, dll. Riset tersebut yang kemudian berhasil menciptakan sebuah ide. Proses penyusunan ide pun tidak terlepas dari kerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti divisi lain di Polresta Sidoarjo, Kasi Humas, Polisi Media, dll. untuk mengantisipasi adanya pemaknaan yang salah terhadap makna yang sebenarnya.

Pengembangan skenario merupakan tahapan setelah ide berhasil ditetapkan. Langkah pengembangan skenario adalah merumuskan ide sebelumnya yang telah diambil melalui rangkaian cerita, dilakukan riset dan dirancang dalam konteks sesuai dengan jalan cerita yang ingin dikembangkan.

Pengembangan karakter merupakan proses perubahan dari kepribadian karakter itu sendiri yang menunjukkan sifat khusus. Dalam hal ini, sebagai seorang produksi cerita diharuskan mampu menjadi karakter yang ada pada cerita tersebut sehingga konten dapat dikembangkan dengan baik dan mampu menyampaikan pesan kepada khalayak dan menambah daya tarik khalayak untuk tetap menonton tayangan yang disajikan.

Pengembangan skenario dan karakter dilakukan oleh Humas Polresta Sidoarjo berdasarkan hasil perancangan ide sebelumnya. Pengembangan skenario umumnya dilakukan oleh salah seorang penulis artikel yang merangkap sebagai staf dari Humas Polresta Sidoarjo sedangkan

2. Produksi,

pada proses ini seluruh tahapan persiapan dan perencanaan dianggap sudah siap untuk dilaksanakan.

3. Pascaproduksi,

Tahap penyelesaian dan penyempurnaan dari proses awal hingga ke proses produksi serta tahap evaluasi dari konten yang telah diproduksi dan dipublikasikan. Tahap pasca produksi merupakan tahap penting dimana semua proses produksi sudah selesai dan akan dilakukan proses editing. Editing merupakan proses terakhir dalam pembuatan sebuah film dalam upaya untuk memilah gambar atau shot, memotong

gambar, Menyusun gambar sekaligus membuang gambar yang tidak diperlukan agar tercipta sebuah alur film yang sesuai dengan plot cerita.